

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dalam Kerja Magang

Penulis mendapatkan kesempatan menjadi Humas *Intern* di Divisi Pemberitaan Hubungan Masyarakat di Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pembimbing lapangan dari penulis merupakan seorang staf Pemberitaan dengan jabatan Analis Berita yang bernama Betria Eriani, S.E, M.Tr.A.P dan juga didampingi oleh staf Pemberitaan lainnya.

3.2 Tugas dalam Uraian Kerja Magang

3.2.1 Tugas Kerja Magang

Fungsi utama humas pemerintah, menurut Lattimore (2010), adalah memberikan informasi yang cukup kepada publik, meningkatkan sikap responsif pemerintah, dan membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan.

Selama empat bulan, penulis melakukan praktik kerja magang di Dewan Perwakilan Daerah, bahwa apa yang dikerjakan penulis pada saat menjadi Humas *Intern* merupakan implementasi dari apa yang dipelajari penulis selama di bangku kuliah, diantaranya adalah pembuatan *press release* dan *press conference* yang merupakan aktivitas dari *PR Writing*.

Berikut aktivitas yang dilakukan oleh seorang penulis *PR Writing* selama magang, diantaranya:

Press Release	Penulis melakukan beberapa persiapan bersama dengan pembimbing lapangan yaitu dengan memahami materi dan kerangka dari sidang atau rapat yang akan dibentuk menjadi <i>press release</i> . Hal ini bertujuan agar penulis menguasai tema sidang sebelum mengikuti sidang tersebut, dan bisa membuat <i>press release</i> dengan lebih terstruktur.
----------------------	--

Press Conference	Penulis menjadi bagian dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi resmi dan menjawab pertanyaan dari media. Penulis membantu selama rangkaian <i>press conference</i> agar acara dapat berjalan dengan sukses.
-------------------------	--

Tabel 3.1 Tugas Penulis Selama Praktik Kerja Magang
(Sumber: Penulis, 2024)

3.2.2 Uraian Kerja Magang

1. Press Release

Press release, juga dikenal sebagai siaran pers adalah komponen penting dari *PR Writing*. Mengandung berita yang disusun oleh departemen hubungan masyarakat (*public relations*), lalu didistribusikan kepada media untuk disebarkan kepada masyarakat. *Press release* penting dalam strategi *public relations* karena membantu membangun hubungan yang baik dengan media.

Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh *public relations* (Humas) suatu organisasi atau perusahaan dan dikirim kepada pengelola pers atau redaksi media massa (seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah) untuk dipublikasikan di media massa (Morissan, 2013).

Selama proses ini, penulis bertugas membantu penyusunan *press release* sesuai dengan kerangka yang telah diberikan. Di Humas Pemberitaan, penulis mengembangkan materi yang telah disediakan. Sebagai contoh, dalam penulisan *press release*, formatnya lebih deskriptif untuk menjelaskan kegiatan seperti Rapat Kerja atau Sidang Paripurna. Informasi dalam *press release* sering kali ditempatkan di akhir berita dan kemudian dibagi dua, yaitu di awal dan di akhir. Namun, penulisan tersebut tetap mengandung elemen penting seperti rumus 5W + 1H yang jelas serta nilai berita yang lengkap.

Press release layak muat jika ditulis dengan gaya piramida terbalik seperti berita langsung. Dalam buku Dasar-Dasar *Public Relations*, Soemirat dan Ardianto menyatakan bahwa ada tiga hal yang harus dijelaskan:

1. Mempermudah penyuntingan bagi redaksi;
2. Redaksi memilih *press release* berdasarkan lead; dan
3. Pembaca dikategorikan sibuk.

Setelah membuat *lead* sebagai bagian pertama, perlu dilanjutkan dengan mengembangkan *lead* tersebut dalam paragraf kedua untuk memberikan penjelasan atau dukungan lebih lanjut terhadap ide yang disampaikan dalam *lead*. Kemudian, berlanjut ke tubuh berita dengan gaya piramida terbalik, dimulai dari informasi paling penting (*lead*) hingga informasi kurang penting. Paragraf kedua yang mendukung *lead* seharusnya memberikan gambaran lebih rinci tentang peristiwa yang diulas. Paragraf ini lebih fokus pada informasi yang mendukung dan menjelaskan *lead* yang disampaikan dalam paragraf pertama, sementara informasi yang kurang penting disampaikan secara lebih terinci dalam paragraf-paragraf berikutnya.

Untuk menulis *press release*, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Praktisi PR harus menulis dengan sistematika karena mereka harus menulis dengan baik. Kriyantono (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa strategi dalam pembuatan *press release*, diantaranya:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap awal, penulis memutuskan bagaimana jalannya proses penulisan dengan mempertimbangkan ide-ide mendasar yang akan membuat karya tetap fokus dan terarah. Penulis juga perlu mempertimbangkan hal-hal mendasar seperti tujuan, target audiens, dan poin utama yang ingin disampaikan. Penulis dapat menghindari topik yang sensitif dan memastikan semua materi materi penting sudah tercakup.

2. Penulisan (*Organizing & Composing*)

Pada tahap selanjutnya, penulis mulai menetapkan gaya penulisan dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Penulis menyusun ide-ide utama dan menguraikan setiap bagian *press release*, memastikan bahwa semua komponen penting seperti judul yang menarik perhatian, *lead* yang informatif, dan isi yang

jelas. Penulisan dibuat dengan mempertimbangkan kejelasan dan kesesuaian gaya penulisan yang digunakan oleh Lembaga atau perusahaan.

3. Evaluasi (*Editing & Rewriting*)

Setelah tulisan selesai, hasil tulisan dikoreksi secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kesalahan informasi. Penulis membaca kembali *press release* dua kali atau lebih untuk mendeteksi kekurangan yang mungkin terlewatkan pada penulisan awal. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih objektif dan maksimal, disarankan untuk meminta bantuan orang lain dalam proses pengeditan. Orang lain dapat memberikan perspektif baru dan membantu menemukan kesalahan atau kekurangan yang mungkin tidak disadari oleh penulis. Dengan melewati tahapan evaluasi ini, *press release* akan lebih sempurna dan siap untuk diterbitkan.

Selama proses penulisan, penulis mengandalkan upaya mandiri dan bimbingan langsung dari pembimbing lapangan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilakukan secara manual dengan cermat. Penulis aktif bertanya dan berdiskusi dengan pembimbing lapangan untuk memastikan setiap detail dan informasi dalam *press release* akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Bimbingan yang diberikan mencakup berbagai aspek, seperti struktur penulisan, pemilihan kata, dan penyampaian pesan yang efektif. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menghasilkan *press release* yang berkualitas tinggi, mencerminkan kemampuan dalam menyusun konten yang informatif.

Selama empat bulan menjalankan praktik kerja magang di bagian Humas Pemberitaan Dewan Perwakilan Daerah, penulis memiliki beberapa kesempatan untuk menyusun *press release*. Penulis aktif terlibat dalam proses pembuatan *press release*, mulai dari pengumpulan informasi hingga penulisan dan revisi akhir. Setiap *press release* yang dibuat penulis dikerjakan dengan teliti, mengikuti panduan dan standar yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah.

Pada Selasa 19 Maret 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia terkait Pembahasan Pandangan dan Pendapat DPD

RI. Penulis mengikuti Rapat Kerja secara langsung di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI untuk mendapatkan materi yang akan dijadikan *press release* yang kemudian akan dipublikasikan terutama di media online DPD seperti website resmi, Instagram, Twitter, dan Facebook dan juga dijadikan materi untuk Majalah Senator.

Komite IV DPD RI dan Kementerian PPN/BAPPENAS RI Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045

19 Maret 2024 oleh admin



JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat terkait dengan RUU RPJPN 2025-2045. Oleh sebab itu, DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PPN/BAPPENAS RI untuk mendalami RUU RPJPN 2025-2045, bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

KH. Amang Syafruddin, Lc. Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI menyoroti beberapa permasalahan terkait RUU RPJPN 2025-2045 antara lain: pertama, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle-income trap country*) yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan, kedua adanya tantangan berupa pergeseran demografi.

"Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Komite IV DPD RI, memandang perlu untuk melakukan Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan maksud dan tujuan mendapatkan informasi mengenai tantangan global, nasional, dan lokal dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045," ucap Senator Provinsi Jawa Barat tersebut.

Lebih lanjut KH. Amang Syafruddin, Lc. juga menyampaikan bahwa dalam rapat kerja ini Komite IV DPD RI juga akan memberikan masukan dan saran mengenai perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan aspirasi, kebutuhan daerah serta karakteristik masing-masing daerah.

Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa norma yang diatur dalam rancangan undang-undang ini disusun untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hal itu dimuat dalam RUU RPJPN 2025-2045.

"RUU ini diamanahkan kepada Bappenas sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," ucap Suharso Monoarfa.

Gambar 3.1 Rapat Kerja Komite IV dengan Menteri PPN

(Sumber Gambar: www.dpd.go.id)

Press Release selanjutnya yang penulis buat adalah pada Jumat 5 April 2024, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan Sidang Paripurna Ke-

10 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024. Penulis mengikuti Sidang Paripurna secara langsung di Ruang Sidang Paripurna Nusantara V untuk mendapatkan materi yang akan dijadikan *press release* yang kemudian akan dipublikasikan di media online DPD dan untuk materi Majalah Senator.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 2 PADA SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2023-2024

Jakarta - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah melaksanakan tugas yang telah diminta dalam putusan Sidang Paripurna. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang paripurna ke-10 DPD RI masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 yang berlangsung di Nusantara V, Jumat (05/04/2024).

"Dalam melaksanakan fungsi Pengawasan, Komite II telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) dalam rangka membahas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri" ungkap Wakil Ketua Pimpinan Komite II.

Komite II menyampaikan laporan mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka melakukan pengawasan Pelaksanaan Pemilu Serentak, Komite II melakukan kunjungan kerja di masing-masing daerah pemilihan Anggota Komite II pada tanggal 29-31 Januari 2024.

Selanjutnya, dalam sidang paripurna ini, Komite II juga menyampaikan laporan mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melakukan pengawasan Pelaksanaan Pemilu Serentak, Komite II melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada 24-26 Maret 2024.

Kedua hasil pengawasan tersebut kemudian telah disetujui dan dapat ditetapkan oleh pimpinan rapat dan beberapa anggota DPD yang hadir pada Sidang Paripurna ke-10 DPD RI masa sidang IV tahun sidang 2023-2024. *sakha

Jakarta, 5 April 2024

Informasi lebih lanjut hubungi

Nama : Heru Firdan

Jabatan : Kepala Bagian Pemberitaan dan Media

Gambar 3.2 Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang IV (Sumber Gambar: Penulis, 2024)

Press release yang telah disusun oleh penulis akan melalui tahap pemeriksaan terlebih dahulu sebelum direvisi. Setelah direvisi, *press release* tersebut akan diterbitkan di media yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kegiatan ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh bagian Humas

Pemberitaan untuk menyebarkan informasi atau kejadian terkait Dewan Perwakilan Daerah kepada masyarakat.

Press release yang penulis dapat diterbitkan karena telah sepenuhnya mengikuti gaya bahasa internal yang diterapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Setelah melalui proses revisi oleh pembimbing lapangan, dalam penyusunannya penulis sangat memperhatikan tone dan struktur penulisan yang digunakan dalam komunikasi resmi Dewan Perwakilan Daerah, memastikan setiap kalimat mematuhi standar formalitas dan kejelasan yang diharapkan. Selain itu, penulis juga memilih bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh audiens yang mengakses informasi tersebut, mulai dari kalangan masyarakat umum hingga pejabat pemerintah. Penggunaan bahasa yang sederhana namun tetap profesional ini memungkinkan pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan memastikan bahwa *press release* ini sesuai dengan panduan gaya bahasa dan mampu menyampaikan informasi secara jelas dan ringkas, pembimbing lapangan memberikan persetujuan untuk diterbitkan

Gaya bahasa yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah *low context communication* atau komunikasi berkonteks rendah yaitu gaya yang langsung pada intinya dan ringkas. Informasi dikomunikasikan secara sederhana, ringkas, dan jelas dalam segala bentuk komunikasi, termasuk *press release*. Setiap kalimat dibuat untuk menyampaikan gagasan utama dengan jelas dan ringkas kepada audiens. Dengan menggunakan pendekatan komunikasi ini, Dewan Perwakilan Daerah mendukung efektivitas dan transparansi komunikasi lembaga dengan memastikan bahwa semua informasi dipahami dengan cepat dan jelas oleh audiens internal maupun eksternal.

Press release juga merupakan upaya untuk menjalin hubungan baik dengan media, karena tulisan dan pernyataan pers dapat membentuk opini publik mengenai lembaga atau organisasi tersebut. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah agar masyarakat sebagai pembaca media dapat mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dalam kesempatan praktik kerja magang di bagian Humas Pemberitaan, penulis diberi tugas untuk membuat *press*

release. Penyusunan *press release* harus didasarkan pada aktivitas yang dilakukan, baik secara offline maupun online.

2. Press Conference

Press conference adalah kegiatan di mana jurnalis diundang untuk berinteraksi dengan materi yang telah disiapkan sebelumnya oleh departemen Humas. Tujuannya adalah agar materi tersebut dapat diberitakan oleh jurnalis yang hadir dalam acara tersebut melalui media yang mereka wakili. *Press conference* umumnya diadakan dalam situasi-situasi khusus, seperti pengumuman kebijakan penting, menanggapi isu-isu yang memperoleh perhatian masyarakat, memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian, atau memperkenalkan program atau inisiatif baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah.

Press conference bertujuan untuk menyampaikan informasi yang bernilai publik tentang sebuah perusahaan, memberikan responsa tau klarifikasi terhadap informasi negative yang berkembang mengenai instansi atau perusahaan, meningkatkan citra positif dari instansi tersebut, serta menjadi sarana untuk menjaga reputasi.

Sebelum melaksanakan *press conference* di Dewan Perwakilan Daerah, persiapan yang matang sangatlah penting. Proses sebelum penyelenggaraan *press conference* harus dilakukan dengan teliti yang beberapa tahap penting. Pertama, menentukan tujuan dan pesan utama dengan cara berkoordinasi dengan Humas, anggota dewan, dan media. Kedua, menyusun *press release* dan mengumpulkan data dan dokumen yang relevan dengan tujuan *press conference*. Ketiga, menirirkan undangan kepada jurnalis dan media yang akan diundang untuk meliput *press conference*. Keempat, memastikan semua kebutuhan logistik dan keamanan sudah terpenuhi. Kelima, mengadakan briefing dan memberikan kertas yang berisi materi pada wartawan yang berisi informasi dan poin-poin penting. Jika semua tahapan tersebut sudah dilakukan maka *press conference* sudah siap dilaksanakan.

Jika semua tahapan persiapan telah dilakukan dengan matang dan terperinci, maka *press conference* sudah siap untuk dilaksanakan. Namun, keberhasilan *press conference* juga tergantung pada kesiapan tim dalam menghadapi dinamika yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Dengan demikian, penting untuk tetap waspada dan responsif terhadap setiap perubahan yang mungkin timbul, agar *press conference* dapat berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Rabu, 6 Maret 2024 DPD RI melaksanakan Dialog Kenegaraan dengan judul “Peran Konkret Wakil Rakyat Tanggulangi Meroketnya Harga Bahan Pokok” dengan pembicara Wakil Ketua Komite II DPD RI, Anggota Komisi IV DPR RI, dan Pengamat Pertanian/Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.



Gambar 3.3 Dialog Kenegaraan DPD RI

(Sumber Foto: Penulis, 2024)

Press conference yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Daerah biasanya terdiri dari pernyataan resmi dan diikuti sesi tanya jawab dengan wartawan,

memiliki tujuan untuk memberikan informasi resmi kepada media dan publik, juga untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan kenegaraan.

Dialog ini lebih bersifat partisipatif, di mana berbagai pandangan dan opini dibahas secara mendalam dengan tujuan mencapai kesepakatan atau solusi terhadap masalah yang dihadapi negara.

Dalam dialog kenegaraan, para peserta yang hadir biasanya diberikan materi atau kerangka pembahasan untuk membantu mereka mempersiapkan diri dan memahami konteks diskusi yang akan berlangsung. Materi ini berisi ringkasan komprehensif dari seluruh topik yang akan dibahas, termasuk latar belakang isu, poin-poin utama yang akan disampaikan, dan tujuan dari dialog tersebut.



Gambar 3.4 Materi Dialog Kenegaraan DPD RI

(Sumber Foto: Penulis, 2024)

Pada saat *press conference*, diperlukan pemilihan seorang juru bicara (spokesperson) yang dapat menyampaikan pesan dan informasi pada acara tersebut. Peran juru bicara dalam instansi atau perusahaan sangatlah penting karena mereka mewakili lembaga *dalam press conference* maupun saat diwawancarai oleh media.

Seorang juru bicara adalah individu yang memberikan informasi dan memiliki kompetensi untuk mewakili perusahaan. Dalam proses penentuan juru bicara, peserta magang tidak dilibatkan atau diberi informasi mengenai pemilihan atau penentuan juru bicara tersebut (Rosady, 2016).

Berikut adalah media-media online yang diwakili oleh wartawan dalam *press conference* dialog kenegaraan, diantaranya:

MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
Holiz	Pantau.com	Gedau TV	RIAWATV	JMNTV
PR	Citra.com	PR	Antaraja	JR
JMNTV	Updata.co.id	IndoSATU	WI	Infan
PR	IndoStar	abard	Erivipye.mede.co	Radar Kiri
PR	METRO TV	lu & wany	Sampah	lurah.com
SCTV	metratv	Harian Puncak	WASPADA	Presone
Media Crik	SuaraMusi.com	Republika	Magalah.five.com	Jak News
PRESS ROOM	TV one	Kompas	PEKITA RUMAH.CO	Jadid News
NEWS TV	TV one	Radio Denta	Tribunews.com	Baler News
news TV	TV one	Fajar	Jitunews.com	Kantor Kiri
MACTV	RTV	kelelahan Pakya	elsinta	Presire.com
BB	RTV	Jhu men	Bali ppa news	terangany Sevan
telokan.co.id	RTV	BAROMETER	Jabartanews	Reput
Sinpa TV	CNN TV	Magalah.tra	LSRAS post	Wjwew
Sinpa TV	CNN TV	Berita Buaran	Suara Investo.co	Dexte
Aktual.com	CNN TV	Suara Karya		hellenews.com
korjaka	CNN TV	PMOL		Matocnews.c
lurah.co	Kabintan	TEMPO		Ant.aur
RM	PR	Trans media		

Gambar 3.5 Daftar Hadir Media Online

(Sumber Foto: Arsip DPD RI, 2024)

3. Pekerjaan Lainnya

Selama menjalani praktik kerja magang, penulis tidak hanya terlibat dalam kegiatan Humas, tetapi juga melaksanakan berbagai tugas lainnya. Penulis berperan dalam menginput data perjalanan dinas, memastikan bahwa semua informasi terkait perjalanan dinas tercatat dengan rapi dan akurat. Selain itu, penulis juga bertanggung jawab untuk mengarsipkan data perjalanan dinas, mengorganisir dokumen-dokumen penting agar mudah diakses dan digunakan oleh pihak terkait.

Tugas-tugas ini memerlukan ketelitian dan perhatian terhadap detail, serta pemahaman yang baik tentang prosedur administrasi. Dengan menjalankan berbagai peran ini, penulis tidak hanya mendapatkan pengalaman dalam bidang PR tetapi juga mengembangkan keterampilan administratif yang penting dalam mendukung operasional lembaga.

3.3 Kendala Utama

Selama melakukan praktik kerja magang di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dan pembelajaran yang akan menjadi bekal penulis ketika kerja kelak. Dalam memulai hal baru, wajar jika diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika mengikuti praktik kerja magang, penulis dihadapkan dengan berbagai tantangan yang membutuhkan penyesuaian diri yang signifikan. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa kendala selama melaksanakan praktik kerja magang, yaitu:

1. Kendala utama yang penulis alami adalah pemahaman mengenai cara penulisan *press release* di Dewan Perwakilan Daerah dengan apa yang diajarkan dalam mata kuliah *Writing for PR* dan *Media Relations & Publicity Effectiveness* yang cenderung mengambil contoh dari perusahaan swasta. Hal ini disebabkan oleh perbedaan gaya penulisan, Dewan Perwakilan Daerah menggunakan gaya penulisan *low context communication* yaitu mengacu pada gaya penulisan di mana pesan disampaikan secara langsung dan fokus pada informasi yang spesifik yang disampaikan dalam kata-kata yang jelas dan tidak ambigu, sedangkan apa yang sering diajarkan semasa kuliah adalah *high context communication* yaitu gaya penulisan di mana pesan tidak hanya tergantung pada kata-kata yang disampaikan secara langsung, tetapi juga sangat bergantung pada konteks situasional, nuansa, dan hubungan interpersonal yang.
2. Kendala yang penulis hadapi dalam *press conference* adalah saat terjadi kekacauan saat menghadapi jurnalis yang sedang berusaha mendapatkan

informasi sebanyak mungkin untuk dilaporkan di media tempat mereka bekerja.

3. Ketika pertama kali terjun langsung mengikuti sidang dan harus membuat *press release* saat itu juga, maka penulis mendapatkan sedikit tekanan karena harus fokus mendengarkan sidang dan dibarengi dengan membuat *press release*.
4. Keterbatasan pengetahuan penulis tentang hukum dan kebijakan negara menjadi tantangan utama yang dihadapi selama praktik kerja magang. Dengan kurangnya pemahaman tentang aspek hukum dan kebijakan, penulis merasa kesulitan dalam menginterpretasikan berbagai regulasi yang berlaku. Hal ini berdampak pada kemampuan penulis dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan.

3.4 Solusi atas Kendala

Setiap permasalahan pasti membutuhkan jalan keluar, dari semua kendala yang penulis hadapi tentunya penulis sudah menemukan dan mengimplementasikan solusi tersebut, diantaranya:

1. Penulis melakukan bimbingan langsung dengan pembimbing lapangan mengenai perbedaan pemahaman ada mengenai cara penulisan *press release* dan pembuatan *press conference*. Penulis juga mencoba membuat *press release* dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku, kemudian meminta *feedback* dan evaluasi.
2. Sebagai seorang yang ditugaskan untuk mengatur ketertiban *press conference*, tanggung jawab penulis adalah memastikan bahwa situasi dapat dikelola dengan baik dan kembali ke kondisi normal. Cara yang penulis lakukan adalah menyediakan rincian yang jelas tentang agenda acara yang dibutuhkan oleh jurnalis dan berperan aktif dalam mengarahkan jalannya sesi tanya jawab.
3. Penulis terus berlatih melakukan pencatatan cepat selama sidang berlangsung dengan menangkap poin-poin utama dan informasi penting

yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan dalam penulisan *press release*.

4. Penulis sering bertanya kepada staf Humas Pemberitaan dan pembimbing lapangan mengenai keterbatasan pengetahuan penulis tentang hukum dan kebijakan negara, sehingga lambat laun penulis bisa memahami tentang hukum dan kenegaraan yang kompleks.

